

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Floranta, F. (2014). *Aspek-aspek Hukum Perikatan*. CV. Mandar Maju.
- FX. Suhardana. (2009). *Contract Drafting Kerangka Dasar dan Teknik PenyusunanKontrak*. Universitas Atma Jaya.
- HS, S. (2009). *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Sinar Grafika.
- Mertokusumo, S. (1986). *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*.
- Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo. (2010). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. CahayaAtma Pustaka.
- Said, B. (2000). *Ringkasan Hukum Pidana*. F.H. Unpas.
- Simorangkir, J. C. . (2009). *Hukum Perdata Adalah Hukum Yang Memuat Semua Peraturan-Peraturan Yang Meliputi Hubungan-Hubungan Hukum Antara Orang Yang Satu Dengan Orang-Orang Yang Didalam Masyarakat Dengan Menitik Beratkan Kepada Kepentingan Perseorangan*.
- Sitorus, P. (1998). *Pengantar Ilmu Hukum*. CV. Widya Pratama Bandung.
- Soedikno Mertokusumo. (2003). *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Liberty.
- Subekti, R. (1995). *Pokok - Pokok Hukum Perdata*. PT. Intermasa.

------(2008). Hukum Perjanjian. PT Intermasa.

------(2014). Aneka Perjanjian. PT Citra Aditya Bakti.

Suharnoko. (2007). Hukum Perjanjian, Teori dan Analisa Kasus. Kencana
PrenadaMedia Group.

Tjitrosudiby, R. S. dan R. (1996). KUHPperdata. PT. Praty Paramita.

Tresna, R. (2001). Komentar HIR. Paramita.

Utrech, E. (1989). Pengantar Dalam Hukum Indonesia. PT. Lehtian Baru.

B. Peraturan Perundang-undangan

HIR Pengadilan Negeri berwenang memeriksa gugatan yang daerah hukumnya, meliputi: Dimana tergugat bertempat tinggal. Dimana tergugat sebenarnya berdiam (jikalau tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya).-Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 1/1951 Hukum Acara Perdata.

UU NO 14 TAHUN 1985 tentang Mahkamah Agung. Dalam UU ini diatur mengenai kedudukan, susunan, kekuasaan, dan hukum acara mahkamah Agung. Mahkamah Agung adalah Pengadilan Negara Tertinggi dari semua Lingkungan Peradilan, yang dalam melaksanakan tugasnya terlepas dari pengaruh pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain.

PERMA NO 1 TAHUN 2016 Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para

Pihak dengan dibantu oleh Mediator.-PERPRES No. 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

C. Sumber Lain

Hukum Perdata Adalah Hukum Yang Memuat Semua Peraturan-Peraturan Yang Meliputi Hubungan-Hubungan Hukum Antara Orang Yang Satu Dengan Orang-Orang Yang Didalam Masyarakat Dengan Menitik Beratkan Kepada Kepentingan Perseorangan. J.C.T Simorangkir Dkk, Kamus Hukum Sinar Grafika 2009.

Talli, A. H. (2015). Mediasi dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008. 2, 93.

Jurnal Bina Mulia Hukum : Mediasi wajib ditempuh sebagai instrumen untuk mengurangi penumpukan beban perkara perdata di Pengadilan. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan kejelasan tentang proses pelaksanaan mediasi di pengadilan yang meliputi tahapan-tahapan mediasi dan pemberdayaan pelaksanaan mediasi dalam pengurangan perkara, kendala yang dihadapi serta upaya mengatasinya.

<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/2296/Upaya-Hukum-dalam-Hukum-Acara-Perdata.html>